

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM
MENGURANGI KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Disusun Oleh:

Liana Ayu Pratiwi

2216041141



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Definisi Kesejahteraan Sosial	8
2.3 Definisi Kemiskinan	13
2.4 Kerangka berfikir	15
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Tipe Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian.....	16
3.3 Lokasi Penelitian.....	18
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.6 Teknik Keabsahan Data	20
3.7 Uji Keabsahan Data	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	25
V. PENUTUP	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk melindungi individu dan keluarga dari resiko ekonomi dan sosial. terutama mereka yang rentan atau membutuhkan dukungan. Program ini merupakan komponen penting dalam upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dengan perencanaan yang baik, implementasi yang efisien, dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari program ini untuk mengurangi ketidaksetaraan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, melindungi hak-hak sosial, dan menciptakan kesetaraan sosial. Program Kesejahteraan Sosial dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau organisasi nirlaba. Pemerintah tersebut mempekerjakan staff, menyusun kebijakan, dan mengelola distribusi manfaat.

Program-program kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu orang-orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka melakukannya dengan memberikan berbagai jenis bantuan kepada individu atau keluarga yang kesulitan ekonomi. Contoh bantuan ini bisa berupa uang tunai, makanan, atau bahkan bantuan untuk perumahan. Selain itu, program-program ini juga berfungsi sebagai lapisan perlindungan sosial. Artinya, ketika seseorang atau keluarga mengalami peristiwa tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kecelakaan, program kesejahteraan sosial dapat membantu mereka agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjamin bahwa ada dukungan jika mereka menghadapi kesulitan. Program kesejahteraan sosial juga menawarkan akses ke pendidikan dan pelatihan. Ini sangat penting karena membantu individu memperoleh keterampilan baru yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dengan memiliki keterampilan tersebut, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Jadi, program kesejahteraan sosial berperan penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berlandaskan data sistematis adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Dalam program tersebut salah satu media yang menggerakkan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Puskesmas. Upaya yang dilakukan ini diharapkan bisa

memperbaiki penghasilan dengan jaminan dan bantuan finansial seperti BSP, KIS, PKH, KIP, dan RLTH. Bantuan bagi keluarga miskin, perancangan seperti itu bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi serta mendapatkan standar hidup minimal.

Upaya dan cara penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang diatur dalam UU. No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut, pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah upaya yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara, yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Sehingga terbentuknya pelayanan kesejahteraan sosial berbasis penanggulangan kemiskinan menjadi perlindungan utama bagi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat dalam beberapa taun terakhir ini tetapi masih belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang relevan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor rumah tangga ternyata masih tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan secara relevan dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional sehingga menjadi prioritas utama pembangunan dan perubahan. Selama ini pemerintah Indonesia telah memberikan banyak program-program sosial pengentasan kemiskinan. Ada beberapa strategi upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu yang pertama, melindungi keluarga dan masyarakat miskin lainnya melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai aspek kebutuhan. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha untuk pencegahan kemiskinan yang akan datang lagi. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kemiskinan yaitu masalah sosial yang ada pada masyarakat yang pada umumnya diartikan kemiskinan adalah gambaran dari sebuah kondisi dimana kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, dan papan dan ketidakadaan serta kepemilikan dan kurangnya pendapatan. Menurut Schiller (1979), kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dan barang barang yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas, (Sutoyo, 2013:1). Menurut etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak mempunyai harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat

Statistik mengartikan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup yang berada di kondisi dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang telah ada selama bertahun-tahun dari berbagai negara, khususnya Indonesia. Seperti yang ada pada Perpres No. 15 tahun 2010 menyatakan “bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat”. Di Indonesia angka kemiskinan per bulan September 2019 sebesar 24,79 juta atau 9,22% dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Sementara ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui program-program sosial dan ekonomi, tetapi masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Berbagai cara maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji diberbagai negara namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, seperti Indonesia telah berkembang berpuluh puluh tahun tetapi masih dihindangi oleh masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari 240 juta jiwa yang artinya masi sekitar 30 juta rakyat Indonesia saat ini masih masuk kategori miskin dengan pendapatan 1\$ perharinya.

Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan pada garis kemiskinan 4,35% dan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,10 poin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin Provinsi Lampung dapat mengimbangi kenaikan garis kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan data BPS kota Bandar Lampung pada tahun (2022) Maret berada pada level 514.039 perkapita perbulan atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Kepala BPS lampung menyampaikan bahwa angka kemiskinan Lampung mengalami penurunan menjadi 11,57% dibandingkan dengan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersedia, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu:

- Apakah program kesejahteraan sosial yang ada di Bandar Lampung efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut?

- Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program kesejahteraan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah diterapkan di kota Bandar Lampung dalam mengurangi kemiskinan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program kesejahteraan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Bandar Lampung.
- Memberikan saran perbaikan atau perubahan program kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan dampak positifnya terhadap mengurangi kemiskinan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana program kesejahteraan sosial saat ini berhasil dalam mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung
- Membantu pemerintah dan organisasi terkait dalam mengambil langkah-langkah lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung
- Memberikan wawasan kepada pemerintah kepentingan terkait dengan faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam perancangan dan implementasi program-program kesejahteraan sosial

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dari kajian pustaka. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai bahan perbandingan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi penelitian
(Hari Harjanto Setiawan, 2017)	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan perlu adanya pembentukan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang disebut puskesmas. Puskesmas ditempatkan sebagai garda terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu hanya membahas kemiskinan dalam perspektif pekerjaan.
(Maulida Rachma, Yusuf Hidayat & Laila Azkia, 2022)	Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di kelurahan pelambun. Hal ini sangat bergantung dengan program itu sendiri dan pendamping sosial. Adapun hambatannya yaitu,	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang hambatan dalam program kesejahteraan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah

	Pelambuan Kota Banjarmasin	adanya hambatan secara internal dengan adanya ketidaksinkronan antara data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya, adapun hambatan secara eksternal yaitu rendahnya partisipasi dan tingkat pemahaman KPM terhadap PKH.	lokasi yang diteliti oleh peneliti.
(Theresia Ngutra, 2017)	Pemenuhan Hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di kota makassar	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan dimana masyarakat miskin ada yang belum mengenal program dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Strategi yang dilakukan untuk pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota makassar adalah melalui pembangunan rumah susun bertata asrama.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

2.2 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, pentingnya kesejahteraan sosial

mencakup upaya untuk memastikan bahwa individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pentingnya kesejahteraan sosial juga melibatkan perlindungan terhadap risiko dan kerentanan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, kekerasan, dan penyakit. Pentingnya kesejahteraan sosial melibatkan peran pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan, program, dan layanan yang mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih luas.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (UU No. 11, 2009). Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (2009), kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan semua aspeknya tidak dapat diukur. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lain.

2.2.1 Program Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial yang mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu (1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, (2) sebagai kondisi sejahtera dan (3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2008; Fahrudin, 2013). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka definisi kesejahteraan sosial yang digunakan di dalam survei ini, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). ana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk

pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Suharto (2007), menggunakan terminologi pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut dia, Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Selain dari definisi kesejahteraan menurut undang-undang, juga akan diperkuat dengan teori dan konsep menurut para ahli. Dengan demikian diharapkan unsur kesejahteraan dalam definisi tersebut sangat komprehensif. Adapun program kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a. *Quality of life (objective living condition dan subjective well-beeing)* b. *Social cohesion (disparities, inequalities, social exclusion dan social ties/social capital)* c. *Sustainability (human capital dan natural capital)* d. *Dimensions of social change (Sociodemographic and economic structure and values and attitudes)* (Noll, 2004). tulisan ini mengacu pada kesejahteraan menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang akan dikembangkan dengan berbagai referensi untuk lebih memperkaya ide dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia sebagai berikut:

No.	Program	Komponen
1.	Kebutuhan Fisiologis	1. Penghasilan dan Perumahan 2. Kesehatan 3. Hak-hak dasar tentang pendapatan
2.	Keamanan Keselamatan	1. Keamanan fisik dan politik

		2. Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan / keterampilan dan keamanan pekerjaan
3.	Kegiatan individu	Otonomi dan kebebasan
4.	Keterkaitan Miliki	1. Interaksi Sosial 2. Hak-hak dasar sosial
5.	Kompetensi	Kompetensi dan harga diri

Sumber : OECD, 2018

Program Kesejahteraan Sosial dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau organisasi nirlaba. Pemerintah tersebut mempekerjakan staff, menyusun kebijakan, dan mengelola distribusi manfaat. Di Indonesia, terdapat berbagai program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Beberapa program kesejahteraan sosial yang umum di Indonesia yaitu:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan ke pendidikan dan kesehatan. PKH ini juga memiliki tujuan yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan meningkatkan akses kesehatan. PKH ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang ketat oleh pemerintah. Keluarga-keluarga ini dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan dalam PKH yaitu dalam bentuk tunai, yang jumlahnya bervariasi tergantung pada kriteria dan kebutuhan keluarga penerima biasanya diberikan secara berkala. Program ini diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat dan bahwa tujuan program tercapai. Seiring berjalannya waktu program ini telah mengalami perubahan dan perbaikan untuk lebih baik untuk mencapai tujuannya.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan memiliki akses terhadap pangan cukup

dan berkualitas. BNPT merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sasaran utama dari BPNT adalah keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diberikannya dalam bentuk tambahan dana yang bisa digunakan untuk membeli produk pangan pokok lainnya.

3. Program Asuransi Kesehatan Nasional

Program asuransi kesehatan nasional adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk suatu negara. Program ini berfokus pada penyediaan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa memandang status ekonomi.

4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah sebuah program sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk dana tunai. Tujuan utama dalam program ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terdampak oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi dan bencana alam. Program ini merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan secara ekonomi.

5. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

PAMSIMAS ini adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan di Indonesia terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Program ini didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur air minum dan sanitasi. PAMSIMAS ini bukti nyata dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan, meningkatkan akses terhadap sumber daya penting seperti air bersih, dan memberdayakan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam hal ini program berupaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.

6. Kartu Indonesia Pintar

KIP adalah program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga

miskin agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik. Program ini salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan inklusif dan merata serta mengatasi masalah ketidakmampuan finansial dalam mengakses kepentingan.

7. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jamsostek adalah program penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan pekerja formal di suatu negara. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan finansial dan perlindungan sosial bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja lebih tenang dan mendapatkan manfaat dari kontribusi mereka selama bekerja.

8. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial merupakan program yang berusaha membantu individu yang mengalami masalah sosial untuk memperoleh kembali stabilitas hidup mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi anggota yang lebih produktif dalam masyarakat. Sukses program rehabilitasi sosial sering kali memerlukan kerjasama antara sektor pemerintah, non pemerintah, serta dukungan masyarakat yang luas.

9. Program Bedah Rumah

Program bedah rumah merupakan program salah satu yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki atau membangun ulang rumah yang rusak atau tidak layak huni. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan keamanan tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu atau terdampak oleh bencana alam atau faktor lainnya.

10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

PEM adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, mengembangkan usaha, dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Program ini fokus pada pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola usaha, mengakses pasar, dan menciptakan peluang ekonomi.

2.3 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara berkembang,

karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara. Menurut Lincolin Arsyad kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan yaitu masalah sosial yang ada pada masyarakat yang pada umumnya diartikan kemiskinan adalah gambaran dari sebuah kondisi dimana kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, dan papan dan ketidakadaan serta kepemilikan dan kurangnya pendapatan. Menurut Schiller (1979), kemiskinan yaitu ketidakanggapan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dan barang barang yang mencukupi untuk memnuhi kebutuhan sosial yang terbatas, (Sutoyo, 2013:1). Menurut etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak mempunyai harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mengartikan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup yang berada di kondisi dibawah garis kemiskinan (poverty line).

2.3.1 Faktor Penyebab Kemiskinan

- Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Tepat

Upaya pelatihan tenaga kerja yang menyebabkan langkanya produk berskil. Keadaan ini akan mendorong pengusaha untuk memilih proses yang mekanis. Catat bahwa salah satu faktor sukses industrialisasi di asia timur yang sangat padat tenaga kerja, adalah bahwa pemerintah-pemerintah di daerah tersebut telah banyak berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan.

- Distorsi Harga Faktor Produksi Tingginya upah di sektor modern.

Upah yang berlaku untuk tenaga kerja tak berskil di sektor modern di negara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat tekanan serikat pekerja, dan perusahaan asing yang beroperasi dinegara tersebut yang biasanya menentukan upah lebih tinggi dari tingkat upah domestik.

- Pengangguran Penduduk Berpendidikan Tinggi.

Pengangguran tenaga kerja berpendidikan dinegara-negara berkembang tersebut disebabkan karena lapangan kerja tidak sesuai dengan kurikulum yang dikerjakan dibangku sekolah. Salah satu sebab nya adalah karena kurikulum yang disusun dinegara-negara kembang tersebut lebih condong ke ilmu-ilmu sosial yang lebih mudah di selenggarakan dari pada ilmu-ilmu alam dan teknik yang sebenarnya lebih di butuhkan di banyak perusahaan.

2.3.2 Kebijakan Menanggulangi Kemiskinan

Menurut Lincolin Arsyad ada tiga startegi/kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu:

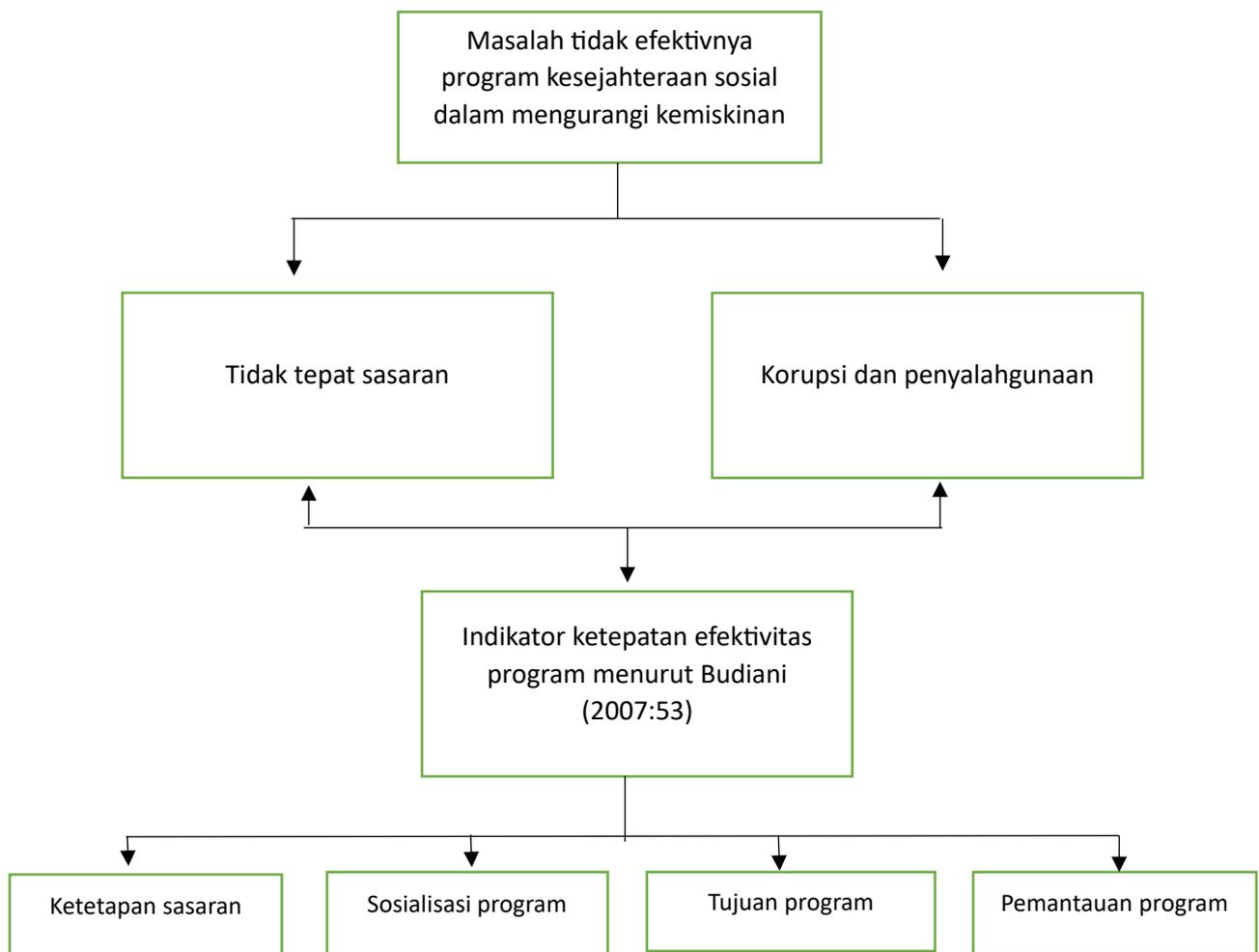
- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 2) Pembangunan Pertanian dan Perdesaan
- 3) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu dengan Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupaka alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut.

Pembangunan Pertanian dan Perdesaan yaitu Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemsikinan pedesaan di hasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. . Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM-LSM dapat memainkan peran yang lebih besar didalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan.Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM-LSM ini untuk beberapa hal mereka mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara efektif dari pada program-program pemerintah.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan acuan yang dibuat oleh peneliti dalam memberikan batasan pada proses penelitian agar fokus penelitian hanya satu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini kerangka berfikir yang digunakan yaitu mengacu pada teori ketepatan efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53). Ahli ini menjelaskan dalam penilaian efektivitas kebijakan terdapat ketepatan yang harus terpenuhi diantaranya ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Sehingga dengan itu peneliti dapat memudahkan peneliti dalam mengetahui efektivitas program kesejahteraan sosial dalam mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Fikir

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berharap dapat menghasilkan suatu penjelasan mendalam mengenai tulisan, ucapan, tingkah laku yang diamati dalam suatu masyarakat dengan pandangan komprehensif. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai sumber lalu menelusurinya dengan teori yang ada agar mendapat hasil yang komprehensif berkaitan dengan Analisis Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Dalam tipe penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana program-program tersebut diimplementasikan, serta dampaknya terhadap kehidupan individu dan keluarga yang menerima manfaat dari program tersebut serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana program-program kesejahteraan sosial telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat di kota Bandar Lampung.

Menurut Tobing (2016), metode penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur untuk mengumpulkan data yang menghasilkan deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat tertulis tentang suatu fenomena atau perilaku tertentu. Pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data akan dijelaskan secara alami dan disajikan secara menyeluruh, dengan tujuan agar data yang dihasilkan tidak mengurangi kompleksitas individu atau organisasi menjadi sekadar variabel atau hipotesis.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif adalah hal yang sangat penting. Ini digunakan untuk mengatur dan membatasi cakupan penelitian, sehingga penelitian dapat lebih terarah pada isu yang akan diselidiki. Fokus ini membantu dalam mengidentifikasi area studi yang relevan dan menentukan cara pengumpulan data. Dengan kata lain, fokus penelitian membantu menekankan pada inti masalah yang menjadi tujuan utama, yaitu mengenai Analisis Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dianalisis menggunakan teori efektivitas program Budiani (2007:53), yaitu:

1. Ketetapan Sasaran, mengacu pada penetapan sasaran atau tujuan yang jelas dari program kesejahteraan sosial. Ketetapan sasaran harus mendefinisikan dengan rinci apa yang ingin dicapai oleh program, seperti berapa banyak keluarga yang diharapkan terbebas dari kemiskinan atau sejauh mana tingkat kemiskinan dapat dikurangi dalam periode tertentu. Ketetapan sasaran ini harus realistis, terukur, dan dapat dicapai.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan lembaga pelaksana dalam menyampaikan program dengan efektif kepada seluruh masyarakat secara umum dan khususnya kepada kelompok sasaran program. Sebagai contoh, langkah kedua setelah verifikasi data keluarga miskin yang akan menerima bantuan adalah pelaksanaan upaya sosialisasi terkait tujuan Program Kesejahteraan Sosial (PKS), hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh keluarga miskin, dan pelaksanaan proses penyaluran bantuan PKS kepada keluarga miskin penerima manfaat.
3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana keselarasan antara apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Seperti, dana yang diterima oleh keluarga miskin seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti keperluan kesehatan dan pendidikan.
4. Pemantauan Program, yaitu mengacu pada tindakan yang terjadi setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program. Hasil dari pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial (PKS) yang dipengaruhi oleh perilaku keluarga miskin dan petugas program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik oleh keluarga miskin maupun petugas program dalam pelaksanaannya, maka program dapat berjalan sesuai dengan tujuan PKS, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam penelitian ini untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan dalam program kesejahteraan sosial di Kota Bandar Lampung. Analisis efektivitas ini mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan. Jika hasil penelitian memenuhi semua kriteria efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan, maka program kesejahteraan sosial dalam mengurangi kemiskinan dapat dianggap berhasil.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung memiliki peran dan wewenang yang krusial dalam mengelola program kesejahteraan sosial. Salah satu wewenang utama adalah perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Dinas Sosial juga bertugas dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta menilai tingkat kebutuhan mereka. Selain itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran untuk program kesejahteraan sosial, mengawasi pelaksanaan program, dan melakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitasnya. Dalam hal ini, mereka dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh oleh peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer ini harus dilakukan pengolahan. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapatkan peneliti dari lapangan secara langsung baik dengan cara wawancara maupun hasil observasi dengan informan.

2. Data Sekunder

Merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Metode ini dilakukan dengan teknik yang sesuai untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Data sekunder ini biasanya di dapatkan melalui riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami teori-teori dari artikel, jurnal, buku atau data yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Kualitatif adalah pengumpulan data berupa bentuk kata-kata dan pernyataan bukan berupa angka. Dalam proses pengumpulan data, ada berbagai metode dan sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Di penelitian kualitatif, ada dua metode utama yang dapat digunakan, yaitu studi pustaka dan observasi. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, menjadikannya sebagai observasi non-partisipatif. Data memiliki peran sangat penting dalam penelitian ilmiah, dan semakin banyak data yang diperoleh secara objektif, semakin baik proses penelitian dan kualitas hasilnya.

1. Studi Pustaka/Literatur

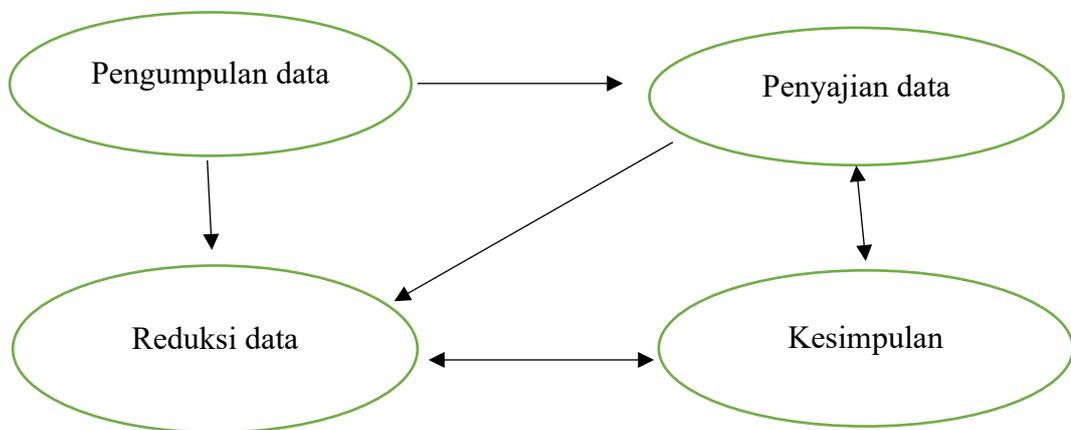
Studi pustaka adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Studi pustaka merupakan sebuah gambaran tentang literatur yang akurat dengan topik tertentu dengan tinjauan sebelumnya yang dibahas oleh peneliti, topik penelitian tertentu, dengan fokus pada kerangka teoritis, hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan, serta metode dan metodologi yang tepat. Kajian literatur berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peneliti dengan pondasi teoritis yang mendukung hipotesis peneliti, serta menyediakan pemahaman mendalam tentang penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dalam domain yang sama. Hal ini juga mencakup bagaimana penelitian-penelitian ini saling terkait dan membentuk dasar bagi penelitian. Artinya dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait fenomena efektivitas program kesejahteraan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Peneliti berupaya mengumpulkan berbagai literatur melalui pencarian *google scholar* dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik permasalahan.

2. Observasi non-partisipatif

Observasi non-partisipatif adalah teknik pengumpulan data atau informasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Dalam observasi non-partisipatif, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian bagian, melakukan penggabungan, menyusun ke dalam pola, memilah yang penting, dan membuat kesimpulan yang bisa di pahami semua orang (Sugiyono, 2018:482). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles and Huberman. Menurut mereka dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Miles dan Huberman membagi kegiatan analisis ke beberapa bagian yaitu pengumpulan data, penyajian data, redaksi data, dan kesimpulan.



Sumber : (Sugiyono 2018)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih elemen-elemen yang pokok, dan memberikan gambaran kepada aspek-aspek yang signifikan secara relevan dengan topik penelitian. Hal ini melibatkan pengidentifikasian tema dan pola yang ada, yang akhirnya menghasilkan gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2018:247-249).

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, flowchart, pictogram, dan format serupa. Dengan penyajian data dalam cara ini, informasi dapat diatur dengan baik dan pola-pola hubungan dapat terlihat lebih jelas, dan memudahkan pemahaman (Sugiyono, 2018:249).

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban terhadap pernyataan masalah yang diidentifikasi pada awalnya, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini disebabkan oleh sifat sementara permasalahan dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif, yang cenderung berkembang seiring berjalannya penelitian di lapangan (Sygiyono, 2018:252-253).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain. Menurut Denzin (1978) menyatakan bahwa ada empat macam triangulasi sebagai teknik keabsahan, yaitu teknik yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik ini mendasar pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial adalah bagian dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. Dalam struktur organisasi, Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah pengawasan dan melapor kepada Wali Kota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Sosial adalah melaksanakan tugas pemerintah daerah dan memberikan dukungan dalam urusan sosial.

a) Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu:

Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

b) Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Gambaran Umum Program Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung

Program kesejahteraan sosial adalah program pemerintah di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu, kelompok, dan masyarakat terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup dengan layak dan mengembangkan potensi mereka serta menjalankan peran sosial mereka. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, kebutuhan psikis, seperti perasaan aman, kasih sayang, dan kebutuhan sosial yang memungkinkan individu untuk berperan dalam masyarakat sesuai dengan peran dan posisi mereka.

Midgley menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah *“A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”*. Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah hasil dari penyelesaian masalah sosial, pemenuhan kebutuhan manusia, dan optimalisasi peluang sosial. Kesejahteraan sosial juga bisa dipandang sebagai upaya dan struktur organisasi yang tersusun dengan baik yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander adalah *“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”*. Kesejahteraan sosial adalah tatanan terstruktur dari layanan sosial dan lembaga-lembaga yang disusun untuk memberikan bantuan kepada individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup yang memadai, kesehatan yang baik, serta membangun hubungan personal dan sosial yang mendukung mereka dalam mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan keluarga dan komunitas mereka.

Menurut Suharto, kesejahteraan sosial adalah sektor atau bidang yang terlibat dalam upaya terstruktur yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah atau swasta dengan tujuan mencegah, mengatasi, atau berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup individu. Kesejahteraan sosial juga mencakup kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup dengan layak dan mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosial mereka. Melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, etika, dan ketenangan dalam kehidupan materi, sosial, dan spiritual, yang

memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial mereka dengan menghormati hak-hak asasi mereka.

Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan dari mulai material dan spiritual sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan layak tanpa adanya halangan apapun. Fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa sosialisasinya serta mobilitas dalam kesehariannya.

4.1.2.1 Tugas dan Fungsi Program Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kesejahteraan, yang berarti mencapai standar dasar dalam aspek seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Untuk mencapai adaptasi yang positif terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, seperti dengan cara mengidentifikasi sumber daya, meningkatkan, dan memperluas tingkat kehidupan yang memenuhi kepuasan.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (preventive)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (curative)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Kesejahteraan Sosial dalam upaya mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung yang diukur melalui 4 indikator yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53) efektivitas program yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran

Dalam pelaksanaan program tertentu, ketepatan dalam menentukan sasaran sangat penting. Budiani (2007: 53) mendukung gagasan ini dengan mengungkapkan bahwa ketepatan sasaran program tercermin dari sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Secara umum, target merujuk pada pencapaian dan hasil yang dihasilkan oleh sebuah lembaga atau entitas dalam periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran merupakan elemen kunci dalam penilaian kesuksesan atau kegagalan suatu program atau kegiatan yang telah dijalankan. Dalam konteks Program Kesejahteraan Sosial, sasaran utama PKS adalah peserta yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa ada masalah dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial terkait dengan ketepatan sasaran. Salah satunya adalah ketidaktepatan antara peserta PKS dengan kondisi aktual mereka. Beberapa peserta PKS yang dulunya memenuhi syarat dan mendapatkan bantuan, kini telah mengalami perbaikan ekonomi dan menjadi mapan, namun mereka masih terdaftar sebagai peserta PKS. Dalam konteks ini, pendamping PKS dan Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk menghapus data peserta PKS yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Hal ini dikarenakan data peserta PKS berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebelum diserahkan kepada Kementerian Sosial. Oleh karena itu, pendamping dan Dinas Sosial hanya dapat memberikan motivasi kepada peserta PKS yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Ketidaktepatan sasaran ini adalah masalah yang sulit untuk diatasi, mengingat bahwa data peserta PKS berasal dari pusat dan sulit untuk dimodifikasi atau disesuaikan. Bahkan jika upaya substitusi atau penggantian peserta PKS yang tidak memenuhi syarat dilakukan dengan

peserta yang memenuhi syarat, masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena data yang diterima oleh pendamping PKS telah diatur oleh pusat dalam format *by name* dan *by address*, sehingga pendamping hanya bisa memproses data berdasarkan nama dan alamat yang tercantum.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah ketidaktepatan sasaran dalam Program Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung masih menjadi masalah yang signifikan. Hal ini mengakibatkan indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran program tidak berjalan efektif.

Sosialisasi program

Sosialisasi program kesejahteraan sosial berlangsung ketika calon penerima manfaat pertama kali menerima Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) dari pendamping Program Kesejahteraan Sosial (PKS) di setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung. Pertemuan awal ini biasanya berlangsung di kantor kelurahan dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat mengenai program kesejahteraan sosial. Pada pertemuan ini, pendamping menjelaskan program PKS, tujuan, manfaatnya, visi, misi, serta peran dan tanggung jawab pendamping. Selain itu, hak dan kewajiban calon penerima manfaat serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam program kesejahteraan sosial juga disosialisasikan.

Selain pertemuan awal, diadakan juga pertemuan rutin antara pendamping dengan penerima manfaat. Pertemuan ini berlangsung sebulan sekali dan dilakukan dalam kelompok yang telah dibentuk sejak pertemuan awal. Pertemuan tersebut kadang-kadang juga berlangsung di rumah masing-masing penerima manfaat secara bergantian. Tujuannya adalah agar pendamping dapat mengamati langsung kondisi dan keadaan penerima manfaat PKS. Pertemuan kelompok ini juga dimaksudkan untuk membahas informasi-informasi terkait PKS serta membahas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat. Selanjutnya, terdapat kegiatan yang disebut P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Ini adalah proses pembelajaran bagi peserta PKS, yang melibatkan pemberian informasi dan diskusi tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraannya efektif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan penyelenggara dalam menjalankan sosialisasi program dengan baik, sehingga program tersebut dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat umum dan sasaran program secara khusus.

Tujuan program

Tujuan dalam suatu program memiliki peranan yang sangat penting dan memengaruhi hasil akhir program. Budiani telah mengungkapkan bahwa ketepatan tujuan program mengacu pada sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan tujuan yang tepat sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama jika program tersebut memiliki orientasi jangka panjang.

Adapun tujuan dari Program Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan melalui kemudahan akses dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
4. Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan.
5. Mengenalkan Manfaat Produk Dan Jasa Keuangan Formal Kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pemantauan program

Dari segi pemantauan program terhadap penerima manfaat PKS, prosesnya berjalan efektif. Ini disebabkan oleh tindakan rutin pendamping dalam memberikan sosialisasi dan pemantauan terhadap penerima manfaat PKS, termasuk memastikan bahwa mereka memenuhi hak dan kewajiban mereka. Dalam hal hak penerima manfaat, pendamping memastikan bahwa bantuan diberikan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, melalui proses yang disebut Rekon Pencairan. Proses Rekon ini bertujuan untuk memastikan apakah penerima manfaat telah menerima dan melakukan pencairan bantuan sesuai ketentuan, dan juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh penerima manfaat dalam proses pencairan.

Sementara itu, dalam hal kewajiban, pendamping juga memastikan bahwa setiap penerima PKS memenuhi kewajibannya melalui dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi komitmen pendidikan dan verifikasi komitmen kesehatan. Verifikasi komitmen pendidikan dilakukan dengan pendamping mengunjungi sekolah di mana anak-anak penerima PKS bersekolah setiap tiga

bulan, guna memastikan bahwa anak-anak tersebut berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Adapun verifikasi komitmen kesehatan mirip dengan verifikasi pendidikan, namun kali ini pendamping berkunjung ke puskesmas atau posyandu setiap tiga bulan untuk memastikan bahwa penerima PKS memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Penghambat Program Kesejahteraan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Menurut Siagian (2015:34) faktor yang mempengaruhi efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Faktor penghambat keefektifan Program Kesejahteraan Sosial (PKS) di Kota Bandar Lampung berdasarkan identifikasi masalah menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dalam konteks Program Kesejahteraan Sosial (PKS) yang bertujuan mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung, kurangnya koordinasi menjadi hambatan yang menghambat efektivitas program. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan data sasaran PKS di Kota Bandar Lampung. Situasi ini berakibat pada keberadaan keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat, karena data mereka tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu.

2. Perencanaan

Perencanaan adalah faktor krusial yang memengaruhi tingkat efektivitas suatu program. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mencapai efektivitas Program Kesejahteraan Sosial (PKS), tetapi kenyataannya, perencanaan dalam PKS di Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik. Belum ada perencanaan yang matang dalam PKS yang

bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kemiskinan. Pendamping hanya memberikan arahan tentang wirausaha tanpa memberikan panduan konkret mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh penerima manfaat, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan belum optimal karena tidak ada persyaratan bagi penerima manfaat untuk menyediakan bukti penggunaan bantuan yang diterimanya, sehingga bantuan belum berdampak pada pengurangan kemiskinan.

3. Ketepatan pelayanan

Ketepatan layanan merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas program. Tetapi, ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman keluarga penerima manfaat tentang layanan jasa keuangan yang seharusnya mereka terima. Beberapa penerima manfaat masih kesulitan dalam mengoperasikan mesin ATM dan dalam menjalankan proses penitipan dana saat pencairan bantuan, sehingga layanan yang seharusnya tepat menjadi kurang optimal.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Kesejahteraan Sosial dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Ketepatan sasaran program merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas program. Namun, terdapat masalah dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial terkait dengan ketepatan sasaran, di mana beberapa peserta PKS yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat masih terdaftar sebagai peserta PKS. Masalah ini sulit diatasi karena data peserta PKS berasal dari Badan Pusat Statistik yang sulit dimodifikasi.
2. Sosialisasi program PKS di Kota Bandar Lampung berjalan efektif. Pendamping PKS memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat tentang program kesejahteraan sosial, hak, dan kewajiban mereka. Pertemuan rutin dan kegiatan P2K2 juga membantu meningkatkan pemahaman peserta PKS.
3. Tujuan program PKS di Kota Bandar Lampung melibatkan upaya meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Tujuan ini penting untuk mengukur efektivitas program.
4. Pemantauan program terhadap penerima manfaat PKS juga berjalan efektif. Pendamping memastikan hak dan kewajiban penerima terpenuhi melalui verifikasi komitmen pendidikan dan kesehatan.
5. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau penghambat program PKS meliputi kejelasan tujuan, strategi pencapaian tujuan, perencanaan, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang bersifat mendidik.
6. Faktor penghambat dalam efektivitas program PKS meliputi kurangnya koordinasi dalam pengelolaan data sasaran, perencanaan yang belum matang, dan ketepatan layanan yang kurang optimal.

Dalam keseluruhan, program kesejahteraan sosial dalam mengurangi kemiskinan di kota Bandar Lampung belum sepenuhnya efektif. Nyatanya masih terdapat penerima manfaat yang duduk di Sekolah Menengah Pertama tidak mau melanjutkan sekolah yang membuat bantuan harus di pending dan menimbulkan iri kepada mereka yang belum menjadi penerima manfaat, masih ditemukan keluarga penerima manfaat yang menggunakan bantuan untuk untuk membeli pulsa, jalan-jalan bahkan untuk mempercantik diri yang tidak sesuai dengan aturan PKS. Tetapi, Program Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kelebihan, seperti sosialisasi program yang efektif dan pemantauan program yang baik. Namun, masih terdapat masalah dalam hal ketepatan sasaran dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau penghambat program. Perbaikan dalam koordinasi, perencanaan, dan ketepatan layanan dapat meningkatkan efektivitas program ini dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan upaya perbaikan koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan data sasaran PKS, sehingga ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan.
2. Perencanaan program PKS harus diperkuat, dengan fokus pada langkah-langkah konkret untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendamping perlu memberikan panduan yang lebih detail kepada penerima manfaat.
3. Perlu meningkatkan pemahaman penerima manfaat terkait dengan layanan jasa keuangan yang mereka terima agar mereka dapat menggunakannya dengan efisien.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, Program Kesejahteraan Sosial di Kota Bandar Lampung dapat menjadi lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, (*Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi, 2010*), hlm.247.
- Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165-186.
- Albert dan Hahnel, "Traditional Welfare Theory," Zmag.org, 2018, www.zmag.org/books.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114-132.
- Arsyad, L. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Astari, U. T., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatanpandak Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(5), 692-705.
- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 162-170.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2, No.1.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill
- Fairus, F., & Syah, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta (Internal Control Analysis Of The Payroll's System And Procedures In Supporting The Efficiency Of Labor Costs In Pt. Pancaran Samudera Transport, Jakarta). *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta*.

- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23.
- Jalmo, T., & Yolida, B. (2019). Pengaruh project based learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan self-efficacy. *Jurnal Bioterdidik: Wahana Ekspresi Ilmiah*, 7(3).
- Maryuni, S. (2017). Efektivitas Implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 25-34.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm. 226. 2
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Ngutra, T. (2017). Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(1), 71-84.
- Septiya, S. (2023). Analisis Program Inovasi Daerah Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Lampung.

- SENJA, R. (2023). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TAPPING BOX TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.
- Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial)*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Siregar, A., Sufiawan, N. A., & Saibah, B. R. A. M. (2022). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 52-68.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.